

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Oleh:

Hidayatul Ayu Safitri

NIM. 05020421041



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatul Ayu Safitri
NIM : 05020421041
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran
Peraturan Daerah Oleh PPNS Satpol PP Perspektif
Maslahah Al-Mursalah (Studi Kasus Di Kabupaten
Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Hidayatul Ayu Safitri

NIM. 05020421041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hidayatul Ayu Safitri
NIM. : 05020421041
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Oleh PPNS Satpol PP Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Kasus Di Kabupaten Kediri)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Agustus 2025
Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, S.H., M.H.
NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

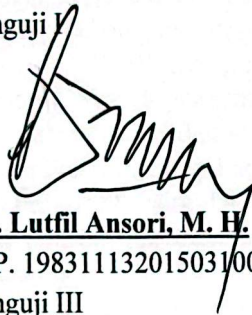
Nama : Hidayatul Ayu Safitri

NIM. : 05020421041

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 September 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

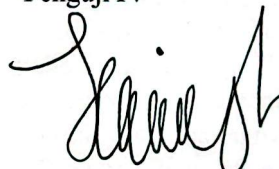
Penguji I


Dr. Lutfil Ansori, M. H.
NIP. 198311132015031001
Penguji III

Penguji II


Prof. Hj. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002
Penguji IV


Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

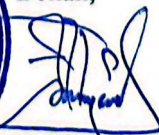

Zainatul Ilmiyah, M. H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 19 Oktober 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hidayatul Ayu Safitri
NIM : 05029421041
Fakultas/Jurusan : FSH/HTN
E-mail address : hidayatulsafitri1307@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penegakkan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kabupaten Kediri)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Oktober 2025

Penulis

(Hidayatul Ayu Safitri)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kabupaten Kediri)”. Pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Kediri cukup banyak dan memerlukan perhatian khusus oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum daerah. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk menekan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang lebih luas. Kabupaten Kediri mencatatkan terdapat 1623 kasus pelanggaran Peraturan Daerah pada tahun 2023. Pada temuan dilapangan ditemukan terdapat 3 (tiga) faktor permasalahan, yaitu kurangnya anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja, aturan hukum yang kurang kuat dalam memberikan sanksi, dan faktor pola hidup masyarakat. Berdasarkan permasalahan di Kabupaten Kediri maka disusun 2 (dua) rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Kediri. *Kedua*, Bagaimana Perspektif masalah mursalah dalam penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara kepada anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif, yaitu data yang diperoleh dilapangan kemudian dikaitkan dengan hasil penelusuran literatur yang kemudian dideskripsikan dalam paparan yang sistematis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan Peraturan tersebut secara spesifik tidak memberikan dampak kepada penurunan pelanggaran peraturan daerah, sehingga ditemukan kendala, yaitu kurangnya anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan tersebut memberikan dampak kurang optimalnya proses penanganannya Peraturan Daerah dan keikutsertaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik dalam proses penyidikan. Sebagai saran, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penambahan anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga Penangan Pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi dapat ditekan dengan baik.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Terdahulu.....	13
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN MASLAHAH AL- MURSALAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	26
A. Teori Penegakan Hukum.....	26
B. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja	32
C. Konsep Penyidik Pegawai Negeri Sipil	36
D. Teori Masalah Mursalah	46
E. Teori Wilayahul Hisbah	51
BAB III PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Profil Objek Penelitian.....	59
C. Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan.....	64

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KABUPATEN KEDIRI	68
A. Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Peraturan Daerah Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kediri.....	68
B. Perspektif Masalah Al-Mursalah Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Kediri.....	77
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Banyaknya Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Kediri Tahun 2023	8
Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Berdasarkan Kecamatan	55
Tabel 3 Jumlah Penduduk Tahun 2020 Kabupaten Kediri	57
Tabel 4 Data Pendidikan Penduduk Usia 7-24 Tahun Kabupaten Kediri	57
Tabel 5 Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Kediri.....	62
Tabel 6 Sub Bidang Satpol PP Kabupaten Kediri	63
Tabel 7 Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri	63

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Yusuf, and Nurbaedah Nurbaedah. "Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Di Kabupaten Kediri (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (July 2023): 133. <https://doi.org/10.32503/mizan.v12i1.4061>.
- Afdal, Zulfikar Muhammad. "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan PERDA Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat." Thesis (Diploma), Institut Pemerintah Dalam Negeri, 2022. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11055>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fahmi, Saiful. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022. <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18613>.
- Fatmala, Kurnia. "Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPPI) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, n.d.
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022).
- Jasin, Johan. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- jumadil, Ahmad, Alwi Jaya, and Andi Hartawati. "Upaya Penegakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone." *Reformasi Hukum* 26, no. 2 (2022).
- Karah, Bagas, and Ahmad Zarkasih. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Pamong Praja Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kota Tangerang Selatan." *Projustitia* 1, no. 1 (2021).
- Kudaedah, Nur Asiah. "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (July 2020): 118–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

- Mardiat, Yayat. "Implemetasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bogor." *Pakuan Justice Journal Of Law* 2, no. 1 (2021).
- Misran, Misran. "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia* 1, no. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>.
- Noorhaliza, Andi, Rizky Afrizal, Shira Permadi, and Tsaniya Azzahra. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Jurnal Nusantara* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.11111>.
- Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Dan Hukum*. Fakultas Syariah Dan Hukum, 22AD.
- "Profil Pemerintah Kabupaten Kediri." *Kediri Kabupaten Web*, n.d. <https://kedirikab.go.id/>.
- Rahmawan, Muhammad Faridz. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Menunjang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan." Thesis (Diploma), IPDN, 2022. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10665>.
- Rasyid Akbar, Ade. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Perdagangan Kakilima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru." Universitas Islam Riau, n.d.
- Riswan. "Potret Wilayahul Hisbah Di Kabupaten Simuelue." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, n.d.
- Sayuti Sayuti. "Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi." *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 1 (June 2024): 51–60. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syarifuddin, Mohammad. *Maslahah Sebagai Alternatif Istibath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah*. 17, no. 1 (2018).
- Widada, Gurmilang. "Efektifitas Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." *Bureaucracy Journal* 3, no. 3 (2023).

Sumber rujukan lain

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pelaksanaan Koordinasi, pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bgai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.